KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM TATAKELOLA PENGAIRAN SAWAH DI DESA CIBERUNG KECAMATAN SELAJAMBE KABUPATEN KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Difal Harfiahsan Devin
NPP. 33.0378
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: difaldevin345@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Muhadam Labolo, M.Si
Email: muhadamlabolo@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *This study is motivated by the fact that paddy field irrigation has not yet been optimal, as indicated by the limited area served by irrigation, damaged irrigation channels, the limited discussion of irrigation issues in the Musrenbangdes (Village Development Planning Deliberation), and the not yet maximal role of water management institutions.* ***Purpose:*** *This study aims to describe the collaboration between the Village Government and the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa or BPD) in the governance of paddy field irrigation in Ciberung Village, Selajambe District, Kuningan Regency, West Java Province, as well as the efforts undertaken by both parties in supporting paddy field irrigation.* ***Method:*** *This study employed a qualitative approach using a descriptive method. The number of informants in this study was 13 people. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were then analyzed using the Miles and Huberman model. The theory applied was Ansell and Gash's (2008) Collaborative Governance theory, with the dimensions of starting conditions, institutional design, facilitative leadership, and the collaborative process.* ***Results:*** *The initial conditions of collaboration were considered good; however, institutional design, facilitative leadership, and the collaborative process remained weak due to the absence of a specific Village Regulation, a regular communication forum, a balanced division of roles, and updated legal status for the P3A (Water User Farmers' Association). The efforts undertaken included channeling farmers' aspirations, integrating irrigation programs into the RKPDes (Village Government Work Plan) and APBDes (Village Revenue and Expenditure Budget), rehabilitating water channels, and utilizing Village Funds, farmer group self-help, and government assistance.* ***Conclusion:*** *The study shows that the collaboration between the Village Government and the BPD in the governance of paddy field irrigation has not yet been optimal. Therefore, it is recommended that collaboration be strengthened in a more targeted manner through village regulations, regular communication forums, and the strengthening of water management institutions so that paddy field irrigation governance can become more effective and sustainable. Therefore, the Village Government and the BPD need to strengthen their collaboration through the formulation of village regulations, the establishment of regular communication forums, the strengthening of supervision and aspiration channeling, as well as increasing the involvement of the P3A and farmer groups in decision-making. In addition, the P3A needs to be strengthened through the renewal of its legal status and the enhancement of its institutional capacity, while other relevant parties need to*

provide technical support, guidance, and rehabilitation of irrigation networks so that paddy field irrigation governance can be more effective, participatory, and sustainable.

Keywords: *Collaborative Governance; Irrigation Governance; Village Consultative Body; Village Government.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengairan sawah, yang ditandai oleh terbatasnya lahan yang teraliri irigasi, kerusakan saluran, terbatasnya pembahasan pengairan dalam Musrenbangdes, dan belum maksimalnya peran kelembagaan pengelola air. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tata kelola pengairan sawah di Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat serta upaya yang dilakukan keduanya dalam mendukung pengairan sawah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Teori yang digunakan adalah *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008) dengan dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. **Hasil/Temuan:** Kondisi awal kolaborasi tergolong baik, namun desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi masih lemah karena belum adanya Peraturan Desa khusus, forum komunikasi rutin, pembagian peran yang seimbang, dan legalitas P3A yang mutakhir. Upaya yang dilakukan meliputi penyaluran aspirasi petani, pengintegrasian program irigasi ke dalam RKPDes dan APBDes, rehabilitasi saluran air, serta pemanfaatan Dana Desa, swadaya kelompok tani, dan bantuan pemerintah. **Kesimpulan:** Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi Pemerintah Desa dan BPD dalam tata kelola pengairan sawah belum optimal Oleh karena itu, disarankan penguatan kolaborasi yang lebih terarah melalui regulasi desa, forum komunikasi rutin, dan penguatan kelembagaan pengelola air agar tata kelola pengairan sawah lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa dan BPD perlu memperkuat kolaborasi melalui penyusunan regulasi desa, pembentukan forum komunikasi rutin, penguatan pengawasan dan penyaluran aspirasi, serta peningkatan keterlibatan P3A dan kelompok tani dalam pengambilan keputusan. Selain itu, P3A perlu diperkuat melalui pembaruan legalitas dan peningkatan kapasitas kelembagaan, sedangkan pihak terkait lainnya perlu memberikan dukungan teknis, pembinaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi agar tata kelola pengairan sawah lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Badan Permusyawaratan Desa; Pemerintah Desa; Tata Kelola Kolaboratif; Tata Kelola Pengairan Sawah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena menjadi sumber pangan, penyerap tenaga kerja, dan penggerak utama ekonomi pedesaan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir produksi padi menunjukkan tren penurunan, baik secara nasional maupun di Kabupaten Kuningan. Di Kabupaten Kuningan, produksi padi turun dari 277.583,76 ton pada tahun 2022 menjadi 261.023,34 ton pada tahun 2023 dan kembali menurun menjadi 223.427,76 ton pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam sektor pertanian, salah satunya terkait pengairan sawah yang belum berjalan optimal.

Permasalahan tersebut tampak nyata di Kecamatan Selajambe, yang memiliki luas sawah beririgasi paling sedikit dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Kuningan. Di antara desa-desa yang ada, Desa Ciberung merupakan desa dengan luas sawah beririgasi paling rendah, yaitu hanya 14,05 hektar dari total 291,95 hektar lahan sawah, sehingga hanya sekitar 4,81 persen lahan yang memperoleh layanan irigasi, sedangkan sisanya masih bergantung pada tadah hujan dan pengairan non-irigasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertanian di Desa Ciberung masih sangat rentan terhadap keterbatasan pasokan air, kerusakan saluran, dan ketidakpastian musim.

Rendahnya cakupan layanan irigasi di Desa Ciberung tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan. Sebagian saluran irigasi mengalami kerusakan, sumber air belum stabil sepanjang musim, dan pembahasan mengenai pengairan sawah dalam Musrenbangdes masih sangat terbatas. Selain itu, meskipun di Desa Ciberung telah terdapat kelompok tani, Gapoktan, dan P3A, dalam praktiknya kelembagaan tersebut belum berjalan optimal, khususnya dalam pengaturan distribusi air dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pengairan sawah di Desa Ciberung merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan penanganan tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga dari aspek tata kelola.

Berbagai studi tata kelola lingkungan menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sumber daya publik memerlukan aturan formal dan mekanisme pengawasan yang jelas agar perubahan perilaku kelembagaan dapat berlangsung lebih efektif (Chai et al., 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengairan pertanian tidak hanya berkaitan dengan kecukupan air bagi tanaman, tetapi juga berhubungan dengan efisiensi energi dan pengurangan emisi. Karena itu, pengelolaan irigasi yang lebih presisi menjadi penting untuk mendukung pertanian yang efisien dan berkelanjutan (Li et al., 2025).

Pengelolaan air pertanian semakin dipahami sebagai hasil interaksi antara perilaku aktor, insentif kelembagaan, dan koordinasi kebijakan, sehingga keberhasilan tata kelola tidak hanya ditentukan oleh teknologi tetapi juga oleh adaptasi sosial dan institusional (Liu et al., 2025).

Pengintegrasian pengelolaan air dan pertanian menunjukkan bahwa masalah irigasi merupakan persoalan kebijakan yang kompleks, sehingga penyelesaiannya memerlukan koordinasi lintas sektor dan pendekatan kolaboratif (Fish et al., 2010).

Kajian pembangunan desa menunjukkan bahwa transformasi sektor desa memerlukan sinergi dan kolaborasi multiaktor, karena pemerintah, masyarakat, akademisi, sektor swasta,

dan media sering kali tidak dapat bekerja sendiri-sendiri dalam mendorong keberhasilan program pembangunan (Susenohaji et al., 2026).

Permasalahan publik yang melibatkan banyak kepentingan tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga secara mandiri, melainkan membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kolaborasi tersebut dibangun melalui hubungan yang saling menguntungkan, pembagian tanggung jawab, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati (Primastuti et al., 2023).

Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat penting karena keduanya memiliki peran strategis dalam perencanaan, penganggaran, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan pembangunan desa. Penelitian kolaborasi lintas disiplin menegaskan bahwa keberagaman aktor tidak otomatis menghasilkan kerja sama yang efektif; kolaborasi baru memberi hasil optimal apabila didukung komunikasi yang jelas, kepercayaan antaraktor, dan pembagian peran yang terstruktur (Hecimovic, 2026). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan pertanian dan pengelolaan sumber daya publik, karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa keterlibatan aktor lain yang terkait (Iyoega et al., 2020).

Collaborative governance dalam pengelolaan irigasi desa menuntut keterlibatan berbagai aktor lokal, karena pemerintah desa berperan sebagai pengarah, sementara unsur lain mendukung keberlanjutan sistem irigasi (Yudanto et al., 2024). *Collaborative Governance* juga adalah sebuah perspektif yang hadir sebagai sebuah strategi baru dengan mengikutsertakan banyak pihak dalam proses untuk menjalankan kebijakan (Labolo et al., 2022).

Namun, penelitian yang secara khusus membahas kolaborasi Pemerintah Desa dan BPD dalam tata kelola pengairan sawah di tingkat desa masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam tata kelola pengairan sawah di Desa Ciberung serta bagaimana upaya keduanya dalam mendukung pengairan sawah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Penelitian

Penelitian terdahulu pada umumnya telah membahas *collaborative governance* dalam konteks pembangunan desa, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya publik, pengendalian hama pertanian, penyediaan air bersih, serta pembangunan sistem pengairan pedesaan. Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menempatkan kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fokus utama dalam tata kelola pengairan sawah di tingkat desa.

Kesenjangan penelitian terletak pada masih terbatasnya studi yang mengkaji pengairan sawah tidak hanya sebagai persoalan teknis infrastruktur dan distribusi air, tetapi sebagai persoalan tata kelola kelembagaan yang menuntut koordinasi antarlembaga desa secara terstruktur. Dalam konteks Desa Ciberung, persoalan pengairan sawah tidak semata-mata berkaitan dengan kerusakan saluran, keterbatasan sumber air, dan rendahnya cakupan lahan beririgasi, tetapi juga berkaitan dengan belum jelasnya pembagian peran antaraktor, belum adanya forum komunikasi rutin, lemahnya dasar regulasi desa, dan belum optimalnya peran kelembagaan P3A.

Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menempatkan pemerintah desa, masyarakat, kelompok tani, atau aktor eksternal lain dalam hubungan kolaboratif yang bersifat umum, sehingga relasi kelembagaan antara Pemerintah Desa dan BPD belum dianalisis secara mendalam sebagai inti pengambilan keputusan, penyaluran aspirasi, penganggaran, dan pengawasan dalam tata kelola pengairan sawah. Akibatnya, masih terdapat kekosongan kajian mengenai bagaimana kedua lembaga tersebut membangun, menjalankan, dan mempertahankan kolaborasi yang efektif dalam menjawab kebutuhan pengairan sawah di tingkat desa.

Kesenjangan lainnya juga tampak pada aspek analitis. Penelitian terdahulu belum banyak mengkaji tata kelola pengairan sawah secara spesifik dengan menggunakan kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash yang meliputi *starting conditions, institutional design, facilitative leadership*, dan *collaborative process*. Padahal, penggunaan kerangka tersebut penting untuk menjelaskan secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan kolaborasi, sehingga permasalahan pengairan sawah dapat dipahami secara lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, posisi penelitian ini adalah mengisi kekosongan empiris dan analitis mengenai kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam tata kelola pengairan sawah di Desa Ciberung. Penelitian ini secara khusus menelaah kualitas kolaborasi kedua lembaga tersebut melalui perspektif *collaborative governance* Ansell dan Gash, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih terarah mengenai kondisi awal kolaborasi, kelemahan desain kelembagaan, peran kepemimpinan fasilitatif, dinamika proses kolaborasi, serta arah penguatan tata kelola pengairan sawah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena permasalahan pengairan sawah di Desa Ciberung tidak hanya bersifat teknis, seperti kerusakan saluran atau keterbatasan air, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola kelembagaan desa. Hal ini terlihat dari terbatasnya lahan yang teraliri irigasi, minimnya pembahasan isu pengairan dalam Musrenbangdes, serta belum optimalnya peran P3A, yang menunjukkan adanya persoalan koordinasi, pembagian peran, dan efektivitas kelembagaan. Implementasi kebijakan, termasuk yang berbasis teknologi informasi, sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan responsivitas pemangku kepentingan, sehingga keberhasilan program ditentukan oleh kapasitas aktor yang terlibat (Simangunsong & Djaga, 2018). Tanpa penelitian ini, permasalahan pengairan berisiko terus dipahami secara sempit sebagai persoalan teknis, sehingga akar masalah kelembagaan tidak tertangani secara memadai.

Secara praktis, penelitian ini mendesak karena dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Desa, BPD, dan pemangku kebijakan dalam memperbaiki tata kelola pengairan yang lebih efektif. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi Pemerintah Desa dan BPD masih lemah, khususnya dalam desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi, yang berpotensi menyebabkan pengelolaan air tetap tidak optimal dan kepentingan petani kurang terakomodasi. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas tata Kelola (Gunawan et al., 2025). Dalam Fish *et al*. (2010), menyatakan bahwa partisipasi petani juga dipengaruhi oleh modal sosial seperti kepercayaan, jaringan, dan hubungan kelembagaan. Sejalan dengan itu, Kepercayaan, komunikasi, dan modal sosial terbukti memengaruhi partisipasi masyarakat dalam tata kelola irigasi, sehingga hubungan

yang kuat antara pemerintah dan petani menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan air (Mahaarcha & Sirisunhirun, 2023). Sehingga hubungan yang kuat antara pemerintah dan petani menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan irigasi. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam pengelolaan pengairan sawah di Desa Ciberung.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas kolaborasi pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pengelolaan kepentingan publik, khususnya yang berkaitan dengan pertanian dan pelayanan dasar masyarakat desa. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian kolaborasi dalam konteks desa memiliki variasi fokus, metode, pendekatan, serta objek penelitian yang berbeda-beda sesuai dengan persoalan yang dikaji. Tanda Setiya, Y. Hadiwibowo, T. Raharjo, dan N.A. Kustiani meneliti ketahanan pangan masyarakat desa melalui kolaborasi pemerintah desa, BPD, donatur, pemerintah kabupaten, dan PKK dengan metode kualitatif, yang berfokus pada masyarakat desa sebagai subjek pembangunan (Setiya et al., 2023).

Ahmad Rifai, Syahruddin Hattab, dan Agusta Sri Astuti mengkaji pembangunan sistem pengairan pedesaan menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada hambatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah serta pentingnya pemeliharaan rutin dan peningkatan infrastruktur (Rifai et al., 2025).

Syafri Rizkiansya Rohim dan Pungky Praja Jatmika meneliti kolaborasi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam pembangunan desa menggunakan metode kualitatif, dengan penekanan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan melalui Musyawarah Desa dan partisipasi masyarakat (Rizkiansyah et al., 2023).

Mia Priluddin Andreo Wahyudi Atmoko membahas *collaborative governance* dalam pengendalian hama pertanian menggunakan metode kualitatif, dengan objek kajian berupa keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, FAO atau NGO, perguruan tinggi, serta masyarakat lokal dalam penanganan persoalan pertanian (Priluddina & Atmoko, 2024).

Yohana Irmina Dola juga meneliti sinergi kepala desa dan BPD dalam penyediaan air bersih menggunakan metode kualitatif, dengan fokus pada peran kelembagaan desa, hambatan regulasi, keterbatasan infrastruktur, lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat (Dola, 2025). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan ragam fokus kajian kolaborasi di tingkat desa, namun belum secara khusus membahas kolaborasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam tata kelola pengairan sawah, sehingga penelitian ini memiliki posisi yang berbeda sekaligus melengkapi kajian-kajian sebelumnya.

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memiliki persamaan pada penggunaan metode kualitatif serta penekanan pada keterlibatan pemerintah desa, BPD, masyarakat, dan dalam beberapa kasus aktor eksternal, dalam penyelesaian persoalan publik. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu ketahanan pangan Setiya *et al*. (2023), pembangunan sistem pengairan pedesaan Rifai *et al.* (2025), pembangunan desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Rizkiansya Rohim & Jatmika, 2023), pengendalian hama pertanian Priluddina & Atmoko, (2024), serta penyediaan air bersih Dola & Murni, (2025).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan karena belum secara khusus mengkaji kolaborasi Pemerintah Desa dan BPD dalam tatakelola pengairan sawah, serta belum menganalisisnya secara eksplisit menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi yang berbeda sekaligus melengkapi penelitian sebelumnya dengan memfokuskan kajian pada kolaborasi Pemerintah Desa dan BPD dalam tatakelola pengairan sawah di Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan perspektif *collaborative governance* Ansell dan Gash.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa umumnya melibatkan pemerintah desa, BPD, masyarakat, dan aktor eksternal dalam isu ketahanan pangan, pembangunan desa, pengendalian hama pertanian, penyediaan air bersih, serta pembangunan sistem pengairan pedesaan. Namun, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menempatkan relasi kelembagaan antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai inti analisis dalam tata kelola pengairan sawah di tingkat desa.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek dan lokus penelitian, tetapi juga pada kontribusi teoretisnya terhadap penerapan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash pada konteks tata kelola pengairan sawah desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada konteks desa, kondisi awal kolaborasi yang relatif kondusif, seperti adanya tujuan bersama dan minim konflik, belum secara otomatis menghasilkan tata kelola kolaboratif yang efektif apabila tidak ditopang oleh desain kelembagaan yang spesifik, kepemimpinan yang benar-benar memfasilitasi kesetaraan aktor, dan proses kolaborasi yang berlangsung rutin serta terlembagakan.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas penerapan teori *Collaborative Governance* dari yang semula banyak digunakan pada konteks kebijakan publik lintas-aktor yang lebih luas menjadi lebih spesifik pada relasi dua lembaga desa yang memiliki kewenangan formal, yaitu Pemerintah Desa dan BPD, dalam pengelolaan sumber daya publik berupa pengairan sawah. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penegasan bahwa efektivitas *collaborative governance* di tingkat desa sangat ditentukan oleh keterhubungan antara legitimasi formal, pengaturan peran kelembagaan, dan keberlanjutan forum interaksi, bukan semata-mata oleh adanya niat bekerja sama antaraktor. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberi kontribusi empiris mengenai tata kelola pengairan sawah di Desa Ciberung, tetapi juga memberi penajaman konseptual bahwa penerapan teori Ansell dan Gash pada level desa memerlukan perhatian lebih besar pada aspek legal-formal, distribusi kewenangan, dan institusionalisasi proses kolaborasi

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi Pemerintah Desa dan BPD dalam tata kelola pengairan sawah di Desa Ciberung Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam proses kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam tata kelola pengairan sawah di Desa Ciberung dengan menggunakan kerangka *Collaborative Governance* Ansell dan Gash yang mencakup *starting conditions, institutional design, facilitative leadership,* dan *collaborative process* sebagai landasan analisis (Ansell & Gash, 2008). Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder; data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan desa, dokumen anggaran desa, dokumen kelembagaan, serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Informan ditentukan secara *purposive sampling* karena penelitian kualitatif membutuhkan pihak-pihak yang memahami persoalan dan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Jumlah informan sebanyak 13 orang, yang meliputi Kepala Desa, anggota BPD, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pemerintahan, Ketua Gapoktan, Ketua P3A, Ketua LPM, tokoh masyarakat, Camat Selajambe, dan tiga orang petani. Kepala Desa ditempatkan sebagai informan kunci karena memiliki kewenangan formal dalam pengambilan keputusan desa, pengalokasian anggaran melalui APBDes, koordinasi pembangunan desa, serta keterlibatan langsung dalam penetapan prioritas program yang berkaitan dengan pengairan sawah. Selain itu, Kepala Desa juga memiliki posisi strategis dalam menghubungkan aspirasi masyarakat, hasil musyawarah desa, dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan BPD serta kelembagaan lain seperti kelompok tani dan P3A.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi agar data yang diperoleh bersifat mendalam dan saling melengkapi. Observasi lapangan dilakukan secara langsung pada area persawahan dan jaringan pengairan di Desa Ciberung dengan memusatkan perhatian pada kondisi fisik saluran irigasi, titik-titik kerusakan saluran, ketersediaan air, pemanfaatan sarana pendukung pengairan, serta keterhubungan kondisi fisik tersebut dengan proses pengelolaan oleh aktor desa. Observasi juga diarahkan pada konteks kelembagaan, yakni bagaimana persoalan pengairan dibahas dalam ruang musyawarah, bagaimana peran Pemerintah Desa, BPD, kelompok tani, dan P3A tampak dalam praktik lapangan, serta sejauh mana hasil perencanaan diwujudkan dalam tindakan nyata. Hasil observasi memberikan kontribusi penting untuk menegaskan apakah informasi hasil wawancara sesuai dengan kondisi empiris di lapangan, terutama terkait kerusakan saluran, keterbatasan jangkauan irigasi, dan tindak lanjut program pengairan.

Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan antara Kepala Desa, BPD, perangkat desa, kelompok tani, P3A, tokoh masyarakat, camat, dan petani untuk melihat konsistensi informasi mengenai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pengairan sawah. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data hasil wawancara menggunakan hasil observasi lapangan dan dokumen pendukung seperti RKPDes, APBDes, dokumen usulan kegiatan, serta data atau bukti kegiatan rehabilitasi pengairan. Melalui cara tersebut, informasi yang diperoleh tidak hanya bertumpu pada persepsi informan, tetapi diuji kesesuaiannya dengan kondisi faktual dan dokumen resmi, sehingga validitas hasil penelitian menjadi lebih kuat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara khusus membatasi pembahasan pada kolaborasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tata kelola pengairan sawah di Desa Ciberung. Pembatasan ini penting agar analisis tidak melebar ke isu lain di luar fokus penelitian, sehingga seluruh uraian diarahkan pada bagaimana kedua lembaga tersebut bekerja sama, mengoordinasikan kewenangan, menyusun kebijakan, serta menindaklanjuti kebutuhan masyarakat tani dalam pengelolaan air sawah. Dalam konteks desa agraris seperti Ciberung, pengairan sawah bukan hanya persoalan teknis irigasi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi pertanian, ketahanan pangan lokal, dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BPD menjadi sangat strategis karena kedua lembaga ini memiliki posisi formal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan perumusan kebijakan pembangunan desa.

3.1. Kondisi Awal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BPD di Desa Ciberung tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya hubungan kerja yang relatif harmonis antaraktor yang terlibat, yaitu Pemerintah Desa, BPD, kelompok tani, dan P3A. Setiap pihak pada dasarnya memiliki kepentingan yang sejalan, yakni menjaga agar pengairan sawah tetap berjalan dengan baik sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat. Kesamaan tujuan ini menjadi modal awal yang penting dalam membangun kolaborasi, karena tanpa kepentingan bersama maka kerja sama cenderung sulit berkembang.

Dalam praktiknya, baik Pemerintah Desa maupun BPD sama-sama memahami bahwa pengairan sawah merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya petani yang menggantungkan hidup pada hasil pertanian. Selain kesamaan tujuan, kondisi awal kolaborasi juga didukung oleh tidak adanya konflik besar antarpihak. Hubungan antaraktor cenderung berjalan dalam suasana saling menghormati dan saling mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial di Desa Ciberung cukup kuat untuk menjadi landasan kerja sama.

Dalam banyak kasus, kolaborasi antarlembaga desa sering terhambat karena perbedaan kepentingan politik, perebutan pengaruh, atau lemahnya komunikasi. Namun, pada penelitian ini hambatan semacam itu tidak tampak menonjol, sehingga menjadi kekuatan awal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengelolaan pengairan sawah secara lebih terarah dan berkelanjutan. Walaupun demikian, kondisi awal yang baik tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan fokus kolaborasi yang spesifik pada tata kelola pengairan sawah. Kerja sama yang berlangsung masih cenderung bersifat umum dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa.

Akibatnya, potensi kolaborasi yang sebenarnya besar belum termobilisasi secara optimal. Meskipun hubungan antaraktor harmonis, tanpa arah kerja yang lebih terfokus, kolaborasi cenderung berhenti pada tataran komunikasi umum dan belum sepenuhnya menghasilkan tindakan yang sistematis.

3.2. Desain Kelembagaan

Dari sisi desain kelembagaan, kolaborasi Pemerintah Desa dan BPD dalam tata kelola pengairan sawah di Desa Ciberung belum berjalan optimal. Secara formal, telah tersedia ruang partisipasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta

pengintegrasian program pengairan ke dalam dokumen perencanaan seperti RKPDes dan APBDes. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pengairan sawah telah diakomodasi dalam mekanisme perencanaan pembangunan desa. Kehadiran forum musyawarah juga menandakan adanya ruang bagi masyarakat dan kelembagaan desa untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan irigasi.

Namun, kelemahan utama terletak pada belum adanya Peraturan Desa yang secara khusus mengatur tata kelola pengairan sawah. Ketiadaan regulasi ini menyebabkan koordinasi antaraktor belum memiliki dasar hukum yang kuat dan spesifik. Akibatnya, pengelolaan pengairan masih bergantung pada kesepakatan informal dan momen musyawarah tertentu, bukan pada sistem kelembagaan yang mapan. Kondisi ini berdampak pada belum jelasnya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pengelolaan pengairan.

Selain itu, belum terbentuk forum komunikasi khusus yang secara rutin membahas masalah pengairan sawah. Selama ini, persoalan irigasi lebih sering dibahas secara umum dalam forum pembangunan desa. Kondisi tersebut menyebabkan pembahasan kurang mendalam dan tindak lanjut yang dihasilkan belum terstruktur. Padahal, pengelolaan pengairan membutuhkan forum teknis yang mampu memantau kondisi saluran, mengidentifikasi kerusakan, serta menyusun prioritas penanganan secara berkelanjutan. Kelemahan lain terlihat dari belum diperbaruinya legalitas P3A. Padahal, P3A memiliki peran strategis sebagai pelaksana teknis dalam distribusi dan pemeliharaan air di tingkat lapangan. Kondisi ini menyebabkan peran P3A menjadi kurang optimal dan hubungan kerja dengan Pemerintah Desa serta BPD belum sepenuhnya sinkron. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan kebijakan pengairan juga ikut terpengaruh.

3.3. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif memiliki peran penting dalam mendukung kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BPD. Kepala Desa Ciberung memegang posisi sentral dalam pengambilan keputusan, terutama terkait prioritas anggaran dan program pembangunan desa. Di sisi lain, BPD berperan dalam mengawal dan menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan pengairan sawah. Dengan demikian, BPD berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah desa.Musyawarah desa menjadi ruang utama dalam proses penyampaian aspirasi. Dalam forum tersebut, kebutuhan petani dapat dibahas secara terbuka dan dipertimbangkan dalam penentuan prioritas pembangunan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan akhir masih cenderung bergantung pada Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berjalan belum sepenuhnya bersifat kolektif.Idealnya, dalam kerangka *collaborative governance*, kepala desa tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi setara antaraktor.Dalam konteks ini, kepemimpinan fasilitatif di Desa Ciberung masih perlu diperkuat agar proses pengambilan keputusan lebih partisipatif dan tidak terpusat pada satu aktor.

3.4. Proses Kolaborasi

Proses kolaborasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam tata kelola pengairan sawah di Desa Ciberung menunjukkan perkembangan yang cukup positif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Unsur dialog, kepercayaan, dan komitmen telah mulai terbentuk dalam

praktik kerja sama.Hal ini terlihat dari adanya musyawarah desa, pembahasan usulan petani, serta tindak lanjut berupa rehabilitasi saluran irigasi dan pembangunan embung. Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya berhenti pada komunikasi, tetapi juga menghasilkan tindakan nyata.Beberapa capaian tersebut dapat dikategorikan sebagai *small wins* yang menjadi modal awal penguatan kolaborasi. Misalnya, rehabilitasi saluran irigasi di Dusun Walahar sebesar Rp35.485.000 dan di Dusun Ciganda sebesar Rp20.525.000, serta alokasi Rp38.930.000 untuk saluran irigasi tersier.

Selain itu, pembangunan embung berukuran 9 x 8,70 meter serta dukungan pompa dan pipanisasi menunjukkan adanya upaya peningkatan ketersediaan air bagi pertanian. Namun demikian, capaian tersebut belum merata dan belum mampu menjangkau seluruh lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kolaborasi masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan secara menyeluruh.

Kolaborasi yang berjalan masih lebih berfokus pada penanganan masalah yang bersifat mendesak, sementara kebutuhan jangka panjang seperti pemerataan jaringan irigasi belum tertangani secara optimal. Selain itu, intensitas dialog antaraktor masih terbatas dan belum dilakukan secara rutin. Koordinasi cenderung bersifat ad hoc, yaitu hanya dilakukan ketika muncul permasalahan tertentu.Padahal, pengelolaan pengairan memerlukan pemantauan yang berkelanjutan agar permasalahan dapat diantisipasi secara preventif.

Di sisi lain, inisiatif teknis masih banyak bergantung pada kelompok tani. Dalam beberapa kasus, kelompok tani harus melakukan swadaya atau menyusun proposal secara mandiri untuk memperoleh bantuan.Kondisi ini menunjukkan bahwa peran kolaboratif Pemerintah Desa dan BPD dalam mengoordinasikan sumber daya eksternal belum optimal. Akibatnya, beban inisiatif lebih banyak ditanggung oleh masyarakat, sementara peran pemerintah desa masih cenderung administratif.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam tata kelola pengairan sawah di Desa Ciberung belum optimal apabila dianalisis menggunakan kerangka *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008). Dalam perspektif ini, suatu sistem tata kelola belum dapat dikatakan efektif apabila pencapaian tujuan, proses integrasi, dan kemampuan adaptasinya belum berjalan secara optimal. Temuan ini sejalan dengan pendapat bahwa keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada ketepatan sasaran, kualitas koordinasi, serta kemampuan sumber daya yang terlibat (Nani et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan belum sepenuhnya memenuhi prasyarat efektivitas dalam tata kelola kolaboratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *starting conditions* di Desa Ciberung relatif kondusif karena terdapat kesamaan tujuan antaraktor, hubungan yang cukup harmonis, dan tidak ditemukan konflik besar antara Pemerintah Desa, BPD, kelompok tani, dan P3A. Dalam perspektif Ansell dan Gash, kondisi ini penting karena kepercayaan awal dan minimnya konflik dapat menurunkan biaya koordinasi serta membuka peluang bagi aktor untuk masuk ke dalam proses kolaborasi dengan resistensi yang lebih kecil. Namun, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kondisi awal yang baik belum cukup untuk menggerakkan kolaborasi menuju bentuk yang lebih substantif karena belum diikuti oleh insentif kelembagaan dan agenda bersama yang secara khusus berorientasi pada tata kelola pengairan sawah.

Artinya, *starting conditions* yang positif di Desa Ciberung lebih berfungsi sebagai modal sosial awal, tetapi belum sepenuhnya berubah menjadi kapasitas kolaboratif yang terarah.

Pada dimensi *institutional design*, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Musrenbangdes serta integrasi program pengairan ke dalam RKPDes dan APBDes memang menyediakan ruang formal bagi pembahasan kebutuhan irigasi. Akan tetapi, menurut Ansell dan Gash, desain kelembagaan yang efektif tidak cukup hanya menyediakan arena pertemuan, melainkan juga harus menghadirkan aturan main yang jelas, forum yang inklusif, dan kepastian prosedur interaksi antarpihak. Dalam kasus Desa Ciberung, belum adanya Peraturan Desa khusus, belum rutin terselenggaranya forum komunikasi pengairan, dan belum diperbaruinya legalitas P3A menunjukkan bahwa desain kelembagaan masih lemah dalam memberikan kepastian peran, kewenangan, dan mekanisme koordinasi. Karena itu, kelemahan utama kolaborasi bukan terletak pada ketiadaan interaksi, melainkan pada belum terlembagakannya interaksi tersebut ke dalam aturan dan forum yang stabil. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa desain kelembagaan yang kuat merupakan prasyarat penting dalam *collaborative water governance*, karena mampu memastikan kejelasan peran, aturan, dan koordinasi antaraktor (Zhou et al., 2025).

Pada dimensi *facilitative leadership*, Kepala Desa memegang posisi sentral dalam penentuan prioritas anggaran dan arah pembangunan desa, sedangkan BPD berperan menyalurkan serta mengawal aspirasi masyarakat. Secara teoritis, Ansell dan Gash menempatkan pemimpin fasilitatif bukan sebagai pusat keputusan semata, tetapi sebagai aktor yang membangun ruang dialog, menengahi perbedaan, dan memastikan keterlibatan aktor lain berlangsung setara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa di Desa Ciberung fungsi fasilitatif tersebut belum berjalan optimal karena keputusan akhir masih cenderung bertumpu pada Kepala Desa, sehingga pola hubungan yang terbentuk masih menyisakan kecenderungan top-down. Dengan demikian, persoalan kepemimpinan dalam penelitian ini bukan ketiadaan figur pemimpin, melainkan belum optimalnya transformasi otoritas formal menjadi kepemimpinan yang benar-benar memfasilitasi kolaborasi.

Pada dimensi *collaborative process*, hasil penelitian memperlihatkan bahwa unsur dialog, kepercayaan, komitmen, dan tindakan bersama telah mulai terbentuk melalui musyawarah desa, pembahasan usulan petani, rehabilitasi saluran, dan pembangunan embung. Dalam kerangka Ansell dan Gash, kondisi ini menunjukkan bahwa tahapan *face-to-face dialogue, trust building, commitment to process,* dan *shared understanding* sudah hadir, tetapi belum berkembang secara penuh menuju hasil kolaboratif yang berkelanjutan. Capaian seperti rehabilitasi saluran di beberapa titik dan dukungan sarana pengairan dapat dibaca sebagai *small wins* yang penting untuk menjaga kepercayaan antarpihak. Meski demikian, karena dialog masih bersifat ad hoc, capaian belum merata, dan inisiatif teknis masih banyak ditanggung kelompok tani, maka proses kolaborasi di Desa Ciberung masih berada pada tahap awal konsolidasi dan belum mencapai pola kolaborasi yang mapan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kolaborasi merupakan pendekatan penting dalam penyelesaian masalah publik, tetapi juga menegaskan bahwa kolaborasi tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan proses yang terintegrasi. Hal ini sekaligus menolak anggapan bahwa kolaborasi akan otomatis berhasil hanya dengan adanya kerja sama antaraktor. Oleh karena itu, kolaborasi Pemerintah Desa dan BPD dalam tata kelola pengairan sawah di Desa Ciberung perlu diperkuat

melalui pembentukan regulasi khusus, forum komunikasi rutin, serta penguatan kelembagaan P3A agar mampu menghasilkan tata kelola yang lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam tata kelola pengairan sawah di Desa Ciberung belum berjalan secara optimal. Meskipun pada dimensi kondisi awal telah terdapat kesamaan tujuan, pemahaman peran, dan hubungan yang cukup baik antaraktor, pada dimensi desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi masih ditemukan berbagai kelemahan, yaitu belum adanya Peraturan Desa yang secara khusus mengatur pengairan sawah, belum terbentuknya forum komunikasi rutin, pembagian peran yang belum sepenuhnya seimbang, serta legalitas P3A yang belum diperbarui.

Rekomendasi. Pemerintah Desa dan BPD perlu memperkuat kolaborasi melalui penyusunan regulasi desa, pembentukan forum komunikasi rutin, penguatan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi, serta peningkatan keterlibatan P3A dan kelompok tani dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, P3A perlu diperkuat melalui pembaruan legalitas dan peningkatan kapasitas kelembagaan, sedangkan pihak terkait lainnya perlu memberikan dukungan teknis, pembinaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi agar tata kelola pengairan sawah dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus kajian yang hanya meneliti kolaborasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam tata kelola pengairan sawah di Desa Ciberung. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif sehingga data yang diperoleh sangat bergantung pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan yang terlibat. Keterbatasan waktu penelitian juga menjadi faktor yang menyebabkan pembahasan belum dapat menjangkau seluruh aspek tata kelola pengairan sawah secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian *(future work).* Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan melibatkan aktor lain yang berperan dalam tata kelola pengairan sawah, seperti kelompok tani, P3A, dan pihak-pihak terkait lainnya, agar hasil penelitian lebih komprehensif. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan yang berbeda, seperti kuantitatif atau mixed methods, untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas kolaborasi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan model kolaborasi yang lebih terstruktur agar pengelolaan pengairan sawah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, orang tua, dosen pembimbing, Pemerintah Desa Ciberung, Badan Permusyawaratan Desa, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Chai, K., Zhu, J., Lan, H., & Lu, Y. (2022). Effectiveness of government environmental auditing in the industrial manufacturing structure upgradation. *Frontiers in Environmental Science*, *10*, 1–11. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.995310

Dola, Y. I. (2025). *Sinergi kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam penyediaan air bersih di Desa Umaklaran Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu provinsi Nusa Tenggara Timur*. Intitut Pemerintahan Dalam Negeri. http://eprints.ipdn.ac.id/21975/

Fish, R. D., Ioris, A. A. R., & Watson, N. M. (2010). Integrating water and agricultural management: Collaborative governance for a complex policy problem. *Science of the Total Environment*, *408*(23), 5263–5630. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2009.10.010

Gunawan, I., Simangunsong, F., & Masrich, A. (2025). Human resource capacity development of bureaucrats within the local government of East barito regency, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *15*(1), 50–61. ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/5287/2162

Hecimovic, A. (2026). Collaboration challenges in multidisciplinary audit teams for public sector assurance. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, *38*(6), 1–19. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2025-0098

Iyoega, R., Trilestari, E., & Kirana, C. (2020). Collaborative governance dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bandung. *Perspektif*, *9*(1), 55–65. https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/2864

Labolo, M., Seka, F., & Juanda. (2022). Collaborative governance dalam pengembangan pariwisata budaya di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Visioner*, *14*(2), 97–106. https://doi.org/10.54783/jv.v14i2.575

Li, H., Li, M., Xu, X., & Zhang, Z. (2025). Precision irrigation framework could enhance water productivity and reduce carbon emissions in China. *Communications Earth & Environment*, *7*(113), 1–13. https://doi.org/10.1038/s43247-025-03137-9

Liu, X., Li, Y., Wang, Y., Mao, Z., Li, Y., Li, K., & Liu, L. (2025). Farmer-centered water governance : Integrating behavioral and institutional perspectives on farmland water use efficiency. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, *9*(1734992), 1–17. https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1734992

Mahaarcha, D., & Sirisunhirun, S. (2023). Social capital and farmers ' participation in multi-level irrigation governance in Thailand. *Heliyon*, *9*(8), e18793. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18793

Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021). Efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, *6*(01), 102–111. https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/1738/940

Priluddina, M., & Atmoko, A. (2024). Collaborative governance dalam pengendalian hama pertanian. *Jurnal Kebijakan Publik*, *15*(2), 202–208. https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/8503

Primastuti, A., Sartika, I., Labolo, M., & Akbar, B. (2023). Analysis of collaborative actors in regional inflation control using social network analysis. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, *15*(1), 1–18. https://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/2896

Rifai, A., Hattab, S., & Sri Astuti, A. (2025). Collaborative governance dalam pembangunan sistem pengairan pedesaan di Desa Bakti Agung Kecamatan Poso Pesisir Utara. *Journal Of Publicness Studies*, *02*(01), 1–10. jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps/id/article/view/1814

Rizkiansyah, S., Rohim, & Jatmika, P. P. (2023). Kolaborasi pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan masyarakat dalam membangun desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. *Cahaya Ilmu*, *5*(1), 2313–2316. https://jurnal.stiapembangunanjember.ac.id/index.php/cahayailmu/article/view/374/345

Setiya, T., Hadiwibowo, Y., Raharjo, T., & Kustiani, N. A. (2023). Kemitraan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat desa. *Jurnal Kelitbangan*, *11*(3), 339–352. https://doi.org/10.35450/jip.v11i03.467

Simangunsong, F., & Djaga, A. R. (2018). Program implementation of e-government-based village administration and information system in West Sumba Regency. *Asian Journal of Management Sciences & Education*, *7*(4), 71–82. http://eprints.ipdn.ac.id/2489/

Susenohaji, S., Pratiwi, A. I., Sutawijaya, B., Setyawan, E., & Rahayu, K. S. (2026). Pentahelix driven digital system development in the tourism sector of Indonesian villages. *Discover Sustainability*, *7*(449), 196–214. https://doi.org/10.1007/s43621-026-02824-7

Yudanto, A. A., Solikin, A., & Windani, I. (2024). Collaborative governance to achieve village sdgs : A case study of irrigation systems in Krandegan village. *Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, *07*(04), 535–550. https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v7i4.345

Zhou, X., Lin, Y., Hooimeijer, P., & Monstdadt, J. (2025). Institutional design of collaborative water governance : The river chief system in China. *Environmental Policy and Governance*, *35*(3), 525–537. https://doi.org/10.1002/eet.2152